



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Inspektorat Prov Buat Surat Teguran ke OPD**

RBI, BENGKULU - Ini menindak lanjut hasil temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Inspektorat membuat surat teguran ke seluruh OPD di Provinsi Bengkulu. Seketaris Inspektorat Provinsi Bengkulu, Henny Kauri mengatakan, saat ini pihaknya sedang membuat surat teguran ke seluruh OPD.

BACA HALAMAN 7...

**SAMBUNGAN HAL 1..**

"Memang kita sudah menerima LHP kemarin maka kita nanti akan menyurati teguran ke jajaran OPD untuk ditindak lanjuti," ujarnya kemarin Jumat (3/7). Menurutnya, untuk jumlah temuan belum sampai ke pihaknya. Dalam surat teguran tersebut pihaknya berharap jajaran OPD dapat menindaklanjuti rekomendasi dari BPK tersebut.

"Masing-masing OPD untuk Tindak Lanjut selama 60 hari. Kita ambil progres nya, untuk besaran temuan sendiri kita belum ketahui karena

itu sistem online nanti salah kita sampaikan," tambahnya.

Henny menambahkan, tidak ada terkait kesalahan dalam kelebihan pembayaran. Hanya saja dari rekomendasi BPK tersebut untuk memastikan pembayaran keuangan apakah harus dikembalikan atau tetap dalam kas daerah.

"Itu bukan kesalahan, itu terkait tindak lanjut segera apakah dalam pembayaran keuangan tersebut harus dikembalikan atau tetap dalam kas tersebut," sampainya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih opini WTP tetapi selama

melakukan pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Penyajian dan Penatausahaan Aset Lain-Lain Belum Dilakukan Secara Memadai, Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilakukan Secara Optimal; Paket Pekerjaan Jalan Tidak Sesuai Kontrak dan Denda Keterlambatan Belum Diterima; Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentu-

an; dan Realisasi Pemberian Honorarium Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan dan Asas Kepatutan. Berdasarkan data di BPK, sampai dengan Semester II TA 2019 dari 1.648 rekomendasi senilai Rp 236,74 Miliar yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebanyak 1.077 rekomendasi senilai Rp 112,48 Miliar telah selesai ditindaklanjuti atau tingkat penyelesaian mencapai 65,35%, sehingga masih terdapat sebanyak 571 rekomendasi (34,65%) senilai Rp 124,26 Miliar yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. (Bro)